

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Koordinasi Wilayah II Tahun 2015. LKjIP Badan Koordinasi Wilayah II Tahun 2015 merupakan bentuk komitmen nyata Badan Koordinasi Wilayah II dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Badan Koordinasi Wilayah II telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Badan Koordinasi Wilayah II.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Surakarta,
KEPALA BADAN KOORDINASI WILAYAH II
PROVINSI JAWA TENGAH


Drs. BUDIYANTO EP, M.SI
NIP. 19611006 198703 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Organisasi	1
B. Fungsi Strategis Badan Koordinasi Wilayah II	6
C. Permasalahan Utama yang dihadapi Badan Koordinasi Wilayah II	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. Rencana Strategis.....	8
B. Perjanjian Kinerja 2015	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. Capaian Kinerja Organisasi	17
B. Realisasi Anggaran	22
BAB IV PENUTUP.....	23
Lampiran :	
1. Pengukuran Perjanjian Kinerja	24
2. Anggaran Dan Realisasi Belanja Tahun 2015	26

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP sebagai wujud pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka perwujudan praktek penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Secara umum capaian tata kelola pemerintahan yang baik seperti yang ditargetkan dalam RPJMD 2013-2018, menunjukkan perkembangan yang baik, meskipun beberapa indikator masih memerlukan kerja keras dan perhatian tidak hanya dari Badan Koordinasi Wilayah II Provinsi Jawa Tengah, namun juga komitmen, keterlibatan seluruh instansi pemerintah. Sedangkan tingkat capaian kinerja sasaran Badan Koordinasi Wilayah II Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Penetapan Kinerja Tahun 2015 sebesar 85,06% yang dihitung berdasarkan prosentase rata-rata capaian sasaran. Dari 3 sasaran ditetapkan, seluruhnya sasaran dinyatakan "berhasil". Sasaran dinyatakan "berhasil" jika capaiannya $\geq 75\%$ dari target yang telah ditetapkan. Ke depan untuk mencapai visi Badan Koordinasi Wilayah II Provinsi Jawa Tengah berupa "Terwujudnya Bakorwil II Yang Handal Dalam Mensinergikan Pembangunan Kabupaten/Kota Menuju Jawa Tengah Sejahtera Dan Berdikari", diperlukan koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi baik provinsi, maupun daerah Kabupaten/Kota. Mengingat berbagai target hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah provinsi dan daerah Kabupaten/Kota, dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil (berbasis kinerja) dan bertujuan melayani serta memberdayakan masyarakat. Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2015 telah dikeluarkan dana sebesar Rp. 7.262.187.727- atau (85,06 %) dari pagu sebesar

Rp. 8.537.848.000,-. Hal tersebut menunjukkan adanya efisiensi/penghematan penggunaan anggaran apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 14,94%. Efisiensi tersebut berasal dari pengadaan barang/jasa, penghematan dalam pelaksanaan kegiatan, seperti pengurangan biaya perjalanan dinas, mengurangi rapat-rapat koordinasi , monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Sejalan dengan semangat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, agar daerah dapat mengatur rumah tangganya sendiri dengan prinsip otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia, Badan Koordinasi Wilayah II Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu SKPD Provinsi Jawa Tengah telah melakukan berbagai upaya diantaranya menyusun Rencana Strategis Tahun 2013-2018 sebagai landasan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan umum di daerah.

Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) II Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah. Peraturan Daerah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 100 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Wilayah Provinsi Jawa Tengah yang menyatakan bahwa Bakorwil Jawa Tengah mempunyai Tugas Pokok membantu Gubernur di Bidang Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Umum di daerah, dalam menyelenggarakan tugas pokok dimaksud Bakorwil II Provinsi Jawa Tengah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah umum di daerah;
- b. Menyusun rencana dan program kerja di bidang koordinasi, pembinaan dan pengawasan;
- c. Koordinasi, pembinaan, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan umum di daerah meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;

- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan umum di daerah;
- e. Pelaksanaan kesekretariatan Badan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Bakorwil II Provinsi Jawa Tengah didukung oleh Sumber Daya Manusia dengan perkembangan sebagai berikut :

1. Kondisi per 31 Desember 2014

Data PNS berdasarkan Jabatan :

ESELON			JUMLAH
II	III	IV	
1	3	9	13

Data PNS Berdasarkan Golongan :

NO	PANGKAT/ GOLONGAN	a	b	c	d	JUMLAH
1	IV	4	2			6
2	III	5	22	7	17	51
3	II	9	3	3	5	20
4	I	-	4	1	1	6
JUMLAH						83

Data PNS Berdasarkan Pendidikan :

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Sarjana S2	4
2	Sarjana S1/D-IV	26
3	Diploma/D-III	7
4	SLTA (Sederajat)	29
5	SLTP (Sederajat)	5
6	SD (Sederajat)	12

2. Kondisi per 31 Desember 2015

Data PNS berdasarkan Jabatan :

ESELON			JUMLAH
II	III	IV	
1	4	9	14

Data PNS Berdasarkan Golongan :

NO	PANGKAT/ GOLONGAN	a	b	c	d	JUMLAH
1	IV	2	3	1		6
2	III	4	22	9	17	52
3	II	10	3	4	4	21
4	I	-	1	3	1	5
JUMLAH						84

Data PNS Berdasarkan Pendidikan :

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Sarjana S2	4
2	Sarjana S1/D-IV	28
3	Diploma/D-III	6
4	SLTA (Sederajat)	31
5	SLTP (Sederajat)	3
6	SD (Sederajat)	12

Sementara untuk mendukung tupoksi tersebut Bakorwil II Provinsi Jawa Tengah memiliki sarana dan prasarana dengan perkembangan sebagai berikut :

1. Kondisi per 31 Desember 2014

No	Sarpras	Jumlah	Satuan	Kondisi
1	Komputer	40	Unit	
2	Printer	24	Unit	
3	Notebook/Laptop	19	Unit	
4	LCD Proyektor	13	Unit	
5	Mesin Tulis/Mesin Ketik	24	Unit	
6	AC Sentral	-	Unit	
7	AC Split	49	Unit	
8	AC Casette	21	Unit	
9	Televisi	17	Unit	
10	Telepon External	31	Unit	
11	Sound System	3	Unit	
12	Filling Cabinet	30	Unit	
13	LAN (Local Net Working)	2	Jaringan	
14	Kendaraan Roda 4	5	Unit	
15	Kendaraan Roda 2	12	Unit	
16	Ruang Pertemuan			

	Di Magelang			
	• Ruang Pertemuan I	100	Orang	
	• Ruang Pertemuan II	150	Orang	
	• Pendopo Rumah Dinas	200	Orang	
	Di Surakarta			
	• Ruang Hall	150	Orang	
	• Ruang Rapat I	70	Orang	
	• Ruang Rapat II	70	Orang	
	• Ruang Pertemuan	500	Orang	

2. Kondisi per 31 Desember 2015

No	Sarpras	Jumlah	Satuan	Kondisi
1	Komputer	48	Unit	
2	Printer	32	Unit	
3	Notebook/Laptop	19	Unit	
4	LCD Proyektor	17	Unit	
5	Mesin Tulis/Mesin Ketik	34	Unit	
6	AC Sentral	-	Unit	
7	AC Split	49	Unit	
8	AC Casette	21	Unit	
9	Televisi	21	Unit	
10	Telepon External	31	Unit	
11	Sound System	3	Unit	
12	Filling Cabinet	30	Unit	
13	LAN (Local Net Working)	2	Jaringan	
14	Kendaraan Roda 4	7	Unit	
15	Kendaraan Roda 2	16	Unit	
16	Ruang Pertemuan Di Magelang			

	• Ruang Pertemuan I	100	Orang	
	• Ruang Pertemuan II	150	Orang	
	• Pendopo Rumah Dinas	200	Orang	
	Di Surakarta			
	• Ruang Hall	150	Orang	
	• Ruang Rapat I	70	Orang	
	• Ruang Rapat II	70	Orang	
	• Ruang Pertemuan	500	Orang	

B. Fungsi Strategis Bakorwil II

Badan Koordinasi Wilayah II (Bakorwil II) Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah. Peraturan Daerah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 100 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Wilayah Provinsi Jawa Tengah yang menyatakan bahwa Bakorwil Jawa Tengah mempunyai Tugas Pokok membantu Gubernur di Bidang Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Umum di daerah, dalam menyelenggarakan tugas pokok dimaksud Bakorwil II Provinsi Jawa Tengah mempunyai fungsi :

- a). Perumusan kebijakan teknis bidang koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah umum di daerah;
- b). Menyusun rencana dan program kerja di bidang koordinasi, pembinaan dan pengawasan;
- c). Koordinasi, pembinaan, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan umum di daerah meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;

- d). Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan umum di daerah;
- e). Pelaksanaan kesekretariatan Badan;
- f). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Permasalahan Utama yang dihadapi Badan Koordinasi Wilayah II

- a). Cakupan koordinasi yang luas, yaitu meliputi 13 Kabupaten/Kota, hal ini tidak sesuai dengan prinsip controlling dalam ilmu administrasi yang idealnya maksimal mengkoordinir di 7 wilayah Kabupaten/Kota;
- b). Perubahan Kebijakan Pemerintah, khususnya terkait reformasi birokrasi yang berorientasi e-sytem;
- c). Sumber Daya Manusia yang terbatas khususnya menyangkut kualitas dan skillnya, sehingga kurang mampu mengikuti perubahan yang serba cepat;
- d). Tupoksi yang terlalu luas dan multitafsir.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

1. Rencana Strategis (Renstra)

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa setiap SKPD diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Adapun Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan sebagai berikut :

Visi :

Terwujudnya Bakorwil II Yang Handal Dalam Mensinergikan Pembangunan Kabupaten/Kota Menuju Jawa Tengah Sejahtera Dan Berdikari.

Misi :

1. Meningkatkan kegiatan koordinasi, pembinaan dan pengawasan untuk mewujudkan keseimbangan, keharmonisan dan sinergitas penyelenggaraan Pemerintahan Umum di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
2. Mewujudkan hubungan kerjasama yang baik dan sinkronisasi program-program pembangunan antar pemerintah Kabupaten/Kota dan pemerintah Kabupaten/Kota dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta lembaga-lembaga lain;
3. Meningkatkan koordinasi penanganan dan pelayanan tanggap darurat Bencana Alam di Bakorwil II yang cepat dan tepat.
4. Meningkatkan kerjasama antar daerah dalam rangka pengembangan ekonomi wilayah/kawasan.

Tujuan :

1. Mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah;
2. Meningkatkan koordinasi, fasilitasi dan sinkronisasi pembangunan daerah Kabupaten / Kota dengan Lembaga-lembaga lain;
3. Meningkatkan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan tanggap darurat bencana;
4. Terwujudnya kondisi ideal suatu daerah dan meningkatnya kemampuan untuk mengatur dan mengurus (mencukupi kebutuhan) rumah tangga daerah sendiri secara optimal dengan berbasis sumber daya dan kearifan lokal daerah masing-masing dan pengembangan kerjasama potensi unggulan dan budaya daerah.

Sasaran :

1. Meningkatnya koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kabupaten/Kota di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
2. Meningkatkan koordinasi, fasilitasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan yang sinergi terhadap perlindungan dan pengarusutamaan hak anak;
3. Meningkatnya peran Bakorwil II dalam pelayanan masyarakat;
4. Meningkatnya kebersamaan dan keterpaduan daerah Kab/Kota di Wilayah dalam mengangkat potensi unggulan menuju kemandirian daerah.

Strategi :

1. Peningkatan koordinasi, fasilitasi dan sinkronisasi dalam kerjasama antar daerah, kebijakan pusat, keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Peningkatan koordinasi, fasilitasi dan sinkronisasi dalam Pengarusutamaan Gender (PUG), Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA);
3. Peningkatan koordinasi dan penanganan kebencanaan;
4. Peningkatan koordinasi, fasilitasi dan sinkronisasi dalam perencanaan pembangunan daerah, pameran dan pemasaran produk unggulan daerah;

Kebijakan :

Meningkatkan koordinasi, fasilitasi, mediasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan umum yang harmonis antar pemerintah Kabupaten/Kota dan antara pemerintah Kabupaten/Kota dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Setiap program dan kegiatan dalam Renstra kemudian dinyatakan dalam suatu indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu. Hanya dengan indikator kinerja yang memenuhi kelima karakteristik kualitatif inilah keberhasilan pencapaian program dan kegiatan nantinya dapat dilakukan. Keberhasilan program diukur dengan indikator hasil (outcome), sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (output). Penetapan indikator program dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan program dan kegiatankegiatan yang mendukung program tersebut. Laporan Kinerja Badan Koordinasi Wilayah II Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Indikator kinerja utama Badan Koordinasi Wilayah II Provinsi Jawa Tengah merupakan indikator kinerja output, yang menunjukkan peran utama Badan Koordinasi Wilayah II Provinsi Jawa Tengah dalam pengawasan akuntabilitas keuangan negara dan pemb pembinaan SPIP. Indikatorindikator kinerja utama tersebut, sebagai berikut :

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
1. Mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah		
Meningkatnya koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kabupaten/Kota di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	1) Indeks Williamson	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengukur kesenjangan pendapatan antara wilayah (Kabupaten/Kota), mengingat sampai saat ini di Jawa Tengah masih terdapat kesenjangan pendapatan antar Kab/Kota. • Formulasi Pengukuran : Index Williamson $IW = \sqrt{\frac{(Y_i - Y)^2 f_i / n}{Y}}$ <ul style="list-style-type: none"> Y_i : PDRB perkapita di Kab/Kota i Y : PDRB perkapita rata-rata provinsi f_i : Jumlah penduduk di Kab/Kota i n : Jumlah penduduk di provinsi • Tipe Perhitungan : Kumulatif • Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS)
		Provinsi Jawa Tengah
	2) Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Mediasi bidang Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Mediasi bidang Pemerintahan guna mensinergikan kebijakan bidang pemerintahan di Kab/Kota

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
		<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran : Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Mediasi bidang Pemerintahan pada tahun berjalan. • Tipe Perhitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : Bakorwil I, II, III Provinsi Jawa Tengah
	3) Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Mediasi bidang Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Mediasi bidang Pemerintahan guna mensinergikan kebijakan bidang Pembangunan di Kab/Kota • Formulasi Pengukuran : Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Mediasi bidang Pembangunan pada tahun berjalan. • Tipe Perhitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : Bakorwil I, II, III Provinsi Jawa Tengah
	4) Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Mediasi bidang Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Mediasi bidang Pemerintahan guna mensinergikan kebijakan bidang Masyarakat di Kab/Kota

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
		<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran : Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Mediasi bidang Kemasyarakatan pada tahun berjalan. • Tipe Perhitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : Bakorwil I, II, III Provinsi Jawa Tengah
2. Meningkatkan koordinasi, fasilitasi dan sinkronisasi pembangunan daerah Kabupaten/Kota dengan Lembaga-lembaga lain		
Meningkatkan sinergitas kebijakan pembangunan terhadap peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak	Jumlah Kab/Kota yang telah melaksanakan kebijakan pembangunan terhadap peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih mengingat belum semua Kab/Kota di Jawa Tengah melaksanakan kebijakan pembangunan terhadap peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak • Formulasi Pengukuran : Jumlah Kab/Kota yang telah melaksanakan kebijakan pembangunan terhadap peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak pada tahun berjalan • Tipe Perhitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : Bakorwil I, II, III Provinsi Jawa Tengah

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
3. Meningkatkan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan tanggap darurat bencana		
Meningkatnya sinergitas penanganan Bencana di Kab/Kota	Jumlah fasilitasi penanganan bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penanganan bencana di Kab/Kota. • Formulasi Pengukuran : Jumlah fasilitasi penanganan bencana yang diberikan pada tahun berjalan • Tipe Perhitungan : Kumulatif • Sumber Data : Bakorwil I, II, III Provinsi Jawa Tengah

3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

NO	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target per Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Meningkatnya koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kab/Kota di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Mediasi bidang Pemerintahan	8	6	6	6	6	6
		Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Mediasi bidang Pembangunan	8	5	8	9	10	11
		Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Mediasi bidang Kemasyarakatan	7	8	9	9	9	9

NO	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target per Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
2	Meningkatkan sinergitas kebijakan pembangunan terhadap peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak	Fasilitasi Rakor PUG	1	1	1	1	1	1
		Fasilitasi Rakor PUH	1	1	1	1	1	1
3	Meningkatnya sinergitas penanganan Bencana di Kab/Kota	Jumlah fasilitasi penanganan bencana	2	2	2	2	2	2

B. Perjanjian Kinerja 2015

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Badan Koordinasi Wilayah II pada Tahun 2015 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Gubernur Jawa Tengah untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Badan Koordinasi Wilayah II telah melaksanakan 8 (delapan) program 32 (tiga puluh dua) kegiatan yang didukung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah Rp. 8.537.848.000,-

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan/sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Gubernur Jawa Tengah dengan Kepala Badan Koordinasi Wilayah II Tahun 2015, secara lengkap tercantum pada Lampiran 1

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagaiberikut :

Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	2	3
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Pada tahun 2015 Badan Koordinasi Wilayah II telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Koordinasi Wilayah II Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 dan Rencana Strategis Badan Koordinasi Wilayah II, setidaknya terdapat 3 sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu :

- 1. Sasaran Strategis 1 :** Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Peningkatan koordinasi, fasilitasi dan sinkronisasi dalam kerjasama antar daerah, kebijakan pusat, keamanan dan ketertiban masyarakat.

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1
Meningkatnya koordinasi, fasilitasi dan sinkronisasi
dalam kerjasama antar daerah, kebijakan pusat,
keamanan dan ketertiban masyarakat

Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian Tahun Seblm nya	% Capaian thd Target Akhir Renstra (2018)
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya koordinasi, fasilitasi dan sinkronisasi dalam kerjasama antar daerah, kebijakan pusat, keamanan dan ketertiban masyarakat	Jumlah koordinasi, fasilitasi dan sinkronisasi dalam kerjasama antar daerah, kebijakan pusat, keamanan dan ketertiban masyarakat	22 Keg	22 Keg	100	100	100

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran Meningkatkan koordinasi, fasilitasi dan sinkronisasi dalam kerjasama antar daerah, kebijakan pusat, keamanan dan ketertiban masyarakat dapat dicapai

sesuai dengan target. Untuk capaian kinerja Meningkatnya kualitas koordinasi, fasilitasi dan sinkronisasi dalam kerjasama antar daerah, kebijakan pusat, keamanan dan ketertiban masyarakat diukur dari Indikator Jumlah kegiatan.

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 1 rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, sesungguhnya sama, untuk tahun 2014 tercapai 100%, sedangkan tahun 2015 tercapai 100%.

Realisasi sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 1 adalah sebesar Rp 957.938.304,- atau 89,95% dari total pagu sebesar Rp 1.064.971.000,- Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 10,05% dari Pagu yang ditentukan. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan keberhasilan pencapaian sasaran 1 sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dengan kegiatan antara lain :

- a. Kegiatan Bidang Pemerintahan
- b. Kegiatan Bidang Pembangunan
- c. Kegiatan Bidang Kemasyarakatan

2. Sasaran Strategis 2 : Peningkatan koordinasi, fasilitasi dan sinkronisasi dalam Pengarusutamaan Gender (PUG), Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)

**Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2
Meningkatnya Pengarusutamaan Gender (PUG),
Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)**

Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian Tahun Seblm nya	% Capaian thd Target Akhir Renstra (2018)
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya kualitas Pengarusutamaan Gender (PUG), Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)	Jumlah kualitas Pengarusutamaan Gender (PUG), Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)	2 Keg	2 Keg	100	100	100

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran Meningkatkan Pengarusutamaan Gender (PUG), Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) dapat dicapai sesuai dengan target. Untuk capaian kinerja Meningkatkan Pengarusutamaan Gender (PUG), Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) diukur dari Indikator Jumlah kegiatan.

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 2 rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, sesungguhnya sama, untuk tahun 2014 tercapai 100%, sedangkan tahun 2015 tercapai 100%.

Realisasi sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 2 adalah sebesar Rp 91.397.750,- atau 97,06% dari total pagu sebesar Rp 94.143.000,- Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 2,92% dari Pagu yang ditentukan. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan keberhasilan pencapaian sasaran 2 sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan program Penyelenggaraan Peningkatan koordinasi, fasilitasi dan sinkronisasi dalam Pengarusutamaan Gender dengan kegiatan antara lain :

- a. Fasilitasi Rakor Pengarusutamaan Gender (PUG)
- b. Fasilitasi Rakor Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)

3. Sasaran Strategis 3 : Peningkatan Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3
Meningkatnya Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana

Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian Tahun Seblmnya	% Capaian thd Target Akhir Renstra (2018)
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya koordinasi kesiapsiagaan penanggulangan bencana dan penyaluran air bersih	Jumlah koordinasi kesiapsiagaan penanggulangan bencana dan penyaluran air bersih	1 Keg	1 Keg	100	100	100

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran Meningkatkan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dapat dicapai sesuai dengan target. Untuk capaian kinerja Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana diukur dari Indikator Jumlah kegiatan.

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 3 rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, sesungguhnya sama, untuk tahun 2014 tercapai 100%, sedangkan tahun 2015 tercapai 100%.

Realisasi sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 3 adalah sebesar Rp 756.999.912,- atau 72,96% dari total pagu sebesar Rp 1.037.540.000,- Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 27,04% dari Pagu yang ditentukan.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan keberhasilan pencapaian sasaran 3 sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan program Peningkatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dengan kegiatan antara lain :

- Penyaluran air bersih

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Koordinasi Wilayah II Provinsi Jawa Tengah, pada Tahun Anggaran 2015, didukung dengan Anggaran sebesar Rp. 20.189.413.000,- Anggaran tersebut 100% bersumber dari APBD. Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran terdiri dari Belanja Tindak Lanjut sebesar Rp. 11.651.565.000,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 8.537.848.000,- dengan rincian sebagai berikut :

4. Belanja Pegawai, sebesar Rp. 11.152.870.000,-
5. Belanja Barang dan Jasa, sebesar Rp. 5.863.224.000,-
6. Belanja Modal, sebesar Rp. 1.524.644.000,-

Dilihat dari sisi penyerapan anggaran, Tahun 2014 terjadi efisiensi sebesar Rp 2.337.309.020,- atau 14,16% sedangkan pada Tahun 2015 terdapat efisiensi sebesar Rp. 1.972.271.340,- atau 9,77% yang terdiri dari efisien Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 696.611.067,- (5,98%) dan efisiensi Belanja Langsung sebesar Rp. 1.275.660.273,- (14,94%), maka realisasi efisiensi anggaran belanja tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 0,78%.

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud komitmen Badan Koordinasi Wilayah II dalam rangka mewujudkan Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan disusun berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan dan yang secara keseluruhan telah dapat diwujudkan.

Sasaran tersebut dicapai dengan dukungan indikator kinerja beserta target yang harus dicapai pada tahun 2015 melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka tercapainya Visi dan Misi Badan Koordinasi Wilayah II.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Koordinasi Wilayah II Tahun 2015 ini sekaligus merupakan cerminan kinerja Badan Koordinasi Wilayah II selama Tahun 2015, yang menyajikan informasi pencapaian sasaran, yang mungkin bermanfaat untuk perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.

Surakarta,

KEPALA BADAN KOORDINASI WILAYAH II
PROVINSI JAWA TENGAH


Drs. BUDIYANTO EP, M.Si
NIP. 19611006 198703 1 003

Lampiran 1

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

SKPD : BADAN KOORDINASI WILAYAH II

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kabupaten/Kota di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	22
Meningkatkan koordinasi, fasilitasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan yang sinergi terhadap perlindungan dan pengarusutamaan hak anak;	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	2
Meningkatnya peran Bakorwil II dalam pelayanan masyarakat;	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1

Program	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)
Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	947.294.000,-	APBD
Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	114.430.000,-	APBD
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1.037.540.000,-	APBD

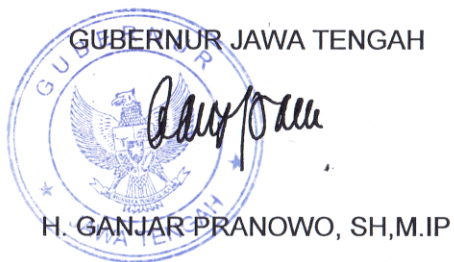
Surakarta, Pebruari 2015





KEPALA BADAN KOODINASI WILAYAH II
PROVINSI JAWA TENGAH


Drs. BUDIYANTO EP, M.SI

Pembina Tk I

NIP. 19611006 198703 1 003



Jabatan	Paraf	Tgl
Wagub		15/2
Sekda		15/2
As. IV/Adm		9/2
Ka. Biro		9/2

Lampiran 2

Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2015

No	Kode Kegiatan	Nama Program / Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)	Target (%)	Rencana Pengeluaran s/d Bulan ini (Rp.)	Realisasi Keuangan (spj)	
						(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR					
1	0.00.05.0001.	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	66.000.000	100	66.000.000	21.500.000	32,58
		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
		PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK					
2	1.11.17.0025.	Kegiatan Advokasi Pengembangan Kota Layak Anak	39.523.000	100	39.523.000	38.821.750	98,23
3	1.11.17.0049.	Kegiatan Rakor Pengarustamaan Gender (PUG)	54.620.000	100	54.620.000	52.576.000	96,26
		OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGA DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN					
		PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM					
4	1.20.16.0001.	Kegiatan Peningkatan Bidang Kesekretariatan	97.390.000	100	97.390.000	49.993.455	51,33
5	1.20.16.0116.	Kegiatan Peningkatan Bidang Pemerintahan	312.774.000	100	312.774.000	289.267.125	92,48
6	1.20.16.0117.	Kegiatan Peningkatan Bidang Pembangunan	286.220.000	100	286.220.000	270.707.000	94,58
7	1.20.16.0118.	Kegiatan Peningkatan Bidang Kemasyarakatan	368.587.000	100	368.587.000	347.970.724	94,41
		SOSIAL					
		PENYELENGGARAAN PENANGULANGAN BENCANA					
8	1.13.19.0001.	Kegiatan Koordinasi Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	1.037.540.000	100	1.037.540.000	756.999.912	72,96

		PENDUKUNG PROGRAM					
		PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN					
9	0.00.01.0001.	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.600.000	100	6.600.000	3.522.810	53,38
10	0.00.01.0209.	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	519.000.000	100	519.000.000	487.171.396	93,87
11	0.00.01.0417.	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	13.200.000	100	13.200.000	6.500.000	49,24
12	0.00.01.0833.	Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah	126.652.000	100	126.652.000	46.438.000	36,67
13	0.00.01.1249.	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	72.600.000	100	72.600.000	72.214.250	99,47
14	0.00.01.1457.	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	66.000.000	100	66.000.000	47.473.400	71,93
15	0.00.01.1665.	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	73.150.000	100	73.150.000	62.458.440	85,38
16	0.00.01.2081.	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	66.550.000	100	66.550.000	49.057.039	73,71
17	0.00.01.2289.	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24.200.000	100	24.200.000	23.033.900	95,18
18	0.00.01.2705.	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	166.400.000	100	166.400.000	147.804.655	88,82
19	0.00.01.2913.	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah	1.605.140.000	100	1.605.140.000	1.559.231.286	97,14
20	0.00.01.3121.	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	610.610.000	100	610.610.000	583.178.000	95,51
21	1.20.01.2497	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.000.000	100	75.000.000	0	0,00
		PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR					
22	0.00.02.0209.	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	513.600.000	100	513.600.000	502.976.000	97,93
23	0.00.02.1041.	Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah	542.500.000	100	542.500.000	389.656.429	71,83
24	0.00.02.1457.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	253.025.000	100	253.025.000	215.595.000	85,21

25	0.00.02.1665.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	418.958.000	100	418.958.000	364.771.150	87,07
26	0.00.02.2081.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	408.787.000	100	408.787.000	242.902.851	59,42
27	0.00.02.2289.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	25.000.000	100	25.000.000	18.248.500	72,99
28	0.00.02.2705.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	22.000.000	100	22.000.000	21.999.270	100,00
29	0.00.02.2913.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	96.800.000	100	96.800.000	74.603.375	77,07
30	0.00.02.3329.	Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan	6.600.000	100	6.600.000	6.189.500	93,78
31	0.00.02.4785.	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	506.044.000	100	506.044.000	458.960.510	90,70
		PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR					
32	0.00.03.0001.	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	56.778.000	100	56.778.000	50.366.000	88,71
JUMLAH / PROGRESS			8.537.848.000	100	8.537.848.000	7.262.187.727	85,06